

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

2025

PERATURAN BUPATI 98, BD 2025/ NO. 99, 30 HLM

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 98 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- dasar hukum UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2007; UU Nomor 6 Tahun 2014 s.d. UU Nomor 3 Tahun 2024; UU Nomor 23 Tahun 2014 s.d. UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 23 Tahun 2005 s.d. PP Nomor 74 Tahun 2012; PP Nomor 5 Tahun 2009 s.d. PP Nomor 1 Tahun 2018; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 43 Tahun 2014 s.d. PP Nomor 11 Tahun 2019; PP Nomor 18 Tahun 2016 s.d. PP Nomor 72 Tahun 2019; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017 s.d. PP Nomor 1 Tahun 2023; PP Nomor 2 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 13 Tahun 2019; PP Nomor 35 Tahun 2023; PP Nomor 1 Tahun 2024; Permendagri Nomor 52 Tahun 2012; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 s.d. Permendagri Nomor 7 Tahun 2024; Permendagri Nomor 62 Tahun 2017; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 s.d. Permendagri Nomor 78 Tahun 2020; Permendagri Nomor 79 Tahun 2018; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 9 Tahun 2021; Permendagri Nomor 14 Tahun 2025; Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 s.d. Perda Nomor 8 Tahun 2020; Perda Nomor 3 Tahun 2022; Perda Nomor 1 Tahun 2024 s.d. Perda Nomor 2 Tahun 2025; Perda Nomor 2 Tahun 2024; Perda Nomor 4 Tahun 2025; dan Perda Nomor 7 Tahun 2025;
 - Peraturan Bupati Bandung Barat ini ditetapkan untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan Pemerintahan Desa sebagai bagian dari

penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengaturan ini bertujuan memberikan kepastian mengenai prinsip, tata cara, persyaratan, serta mekanisme pelaksanaan administrasi keuangan dan pemerintahan desa agar selaras dengan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan negara, perbendaharaan negara, pemerintahan daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah, serta pengelolaan desa. Peraturan ini disusun dengan berpedoman pada dasar hukum yang berlaku, sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pemerintahan desa dapat mendukung peningkatan kinerja, efektivitas, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025
- Agar setiap orang mengetahuinya
 - Penjelasan : 30 Hlm